

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk memahami respons guru terhadap perubahan kebijakan pendidikan, khususnya implementasi Kurikulum Merdeka dan kebijakan Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) di Kota Yogyakarta. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, FGD, dan dokumentasi di empat sekolah penggerak jenjang SMP—dua negeri dan dua swasta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru merespons perubahan kebijakan dengan empat bentuk utama: kepatuhan, penolakan, kombinasi, dan pemisahan. Kepatuhan guru bersifat beragam, mulai dari kepatuhan yang dipaksakan hingga kepatuhan yang dibenarkan. Di sisi lain, penolakan terjadi dalam bentuk aktif maupun pasif. Kompleksitas tuntutan kelembagaan dari kurikulum merdeka yang mengutamakan pembelajaran berbasis siswa dan ASPD yang tetap berbasis standar ujian menyebabkan guru melakukan strategi adaptasi, seperti mengombinasikan materi kurikulum lama dengan kurikulum baru serta memberikan tambahan pembelajaran di luar jam pelajaran resmi. Guru juga mengalami tantangan untuk melakukan perubahan dari praktik kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2013.

Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi respons guru, termasuk tingkat penerimaan terhadap kebijakan yang diidentifikasi melalui keikutsertaan guru dalam program guru penggerak dan keaktifan guru dalam PMM (platform merdeka mengajar). Selain itu terdapat atribut individu yang mempengaruhi respon guru yaitu pengalaman mengajar, mata pelajaran yang diajarkan, keterampilan digital, dan keyakinan profesional. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya harmonisasi sistem evaluasi dan kurikulum, peningkatan pelatihan dan pendampingan guru, serta penguatan paradigma merdeka belajar agar lebih selaras dengan kebutuhan siswa dan tujuan pendidikan nasional.

Kata kunci: Kurikulum Merdeka, ASPD, respons guru, logika institusional, kebijakan pendidikan

Abstract

This study aims to understand teachers' responses to educational policy changes, particularly the implementation of the *Kurikulum Merdeka* and the *Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah* (ASPD) policy in Yogyakarta City. Using a descriptive qualitative approach and a case study method, data were collected through interviews, observations, focus group discussions (FGDs), and document analysis in four *Sekolah Penggerak* (driving schools) at the junior high school level—two public and two private schools.

The findings indicate that teachers respond to policy changes in four main ways: compliance, defiance, a combination of both, and compartmentalization. Teachers' compliance varies, ranging from forced to justified compliance. Meanwhile, defiance manifests in both active and passive forms. The institutional demands of the *Kurikulum Merdeka*, which emphasizes student-centered learning, and the ASPD, which remains exam-oriented, create complexities that lead teachers to adopt adaptive strategies. These include combining elements of the previous curriculum with the new one and providing additional lessons beyond official school hours. Teachers also face challenges in transitioning from the previous 2013 curriculum.

This study also identifies several factors influencing teachers' responses, including their adherence to policies, which is reflected in their participation in the *Guru Penggerak* (teacher leadership program) and engagement with the *Platform Merdeka Mengajar* (independent teaching platform). Additionally, individual attributes such as teaching experience, subject expertise, digital skills, and professional beliefs shape teachers' responses. The study highlights the need for harmonizing evaluation systems and curricula, enhancing teacher training and mentoring, and strengthening the *Merdeka Belajar* (Freedom to Learn) paradigm to better align with students' needs and national education goals.

Keywords: *Kurikulum Merdeka*, Regional Standardized Education Assessment (ASPD), teachers' response, institutional logic, education policy.